

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

##### **1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia**

Sumber daya manusia adalah modal yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.<sup>16</sup> Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan.

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia (SDM) maka semakin mendorong kemajuan suatu

---

<sup>16</sup>Didin S Damanhuri, Muhammad Findi, *Pembangunan Ekonomi Indonesia* (Bogor: IPB Press, 1995), 103.

negara atau daerah. Indeks pemabangunan manusia (IPM) menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia, aspek yang menjadi fokus perhatian adalah peningkatan standar pendidikan, derajat kesehatan, dan mutu ekonomi keluarga. Ketiga hal tersebut satu sama lain saling berkaitan. Dengan demikian dalam konteks pembangunan SDM, ketiga aspek tersebut harus diperhatikan secara utuh.<sup>17</sup>

Indeks pembangunan manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara merupakan negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

---

<sup>17</sup>Imam Hardjanto, *Teori Pembangunan* (Malang: UB Press, 2013), 109.

HDI mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia:<sup>18</sup>

- a. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran
- b. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa dan kombinasi pendidikan dasar, menengah,
- c. Standar kehidupan yang layak diukur dengan GDP produk domestik bruto dalam paritas kekuatan beli dalam dollar AS

Setiap komponen IPM distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut:<sup>19</sup>

**Dimensi Kesehatan**

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

<sup>18</sup>Imam Hardjanto, *Teori Pembangunan*, 110.

<sup>19</sup> IPM, <http://ipm.bps.go.id/> diakses pada tanggal 10 Maret 2018

**Dimensi Pendidikan**

$$I_{\text{HLS}} = \frac{\text{HLS} - \text{HLS}_{\text{min}}}{\text{HLS}_{\text{maks}} - \text{HLS}_{\text{min}}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{\text{RLS} - \text{RLS}_{\text{min}}}{\text{RLS}_{\text{maks}} - \text{RLS}_{\text{min}}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

**Dimensi Pengeluaran**

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$\text{IPM} = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

**2. SDM Dalam Konteks Pembangunan<sup>20</sup>**

Ada empat kebijakan pokok dalam upaya peningkatan pembangunan

- a. Peningkatan kualitas hidup yang meliputi kualitas manusianya seperti jasmani dan rohani, dan kualitas

---

<sup>20</sup>Imam Hardjanto, *Teori Pembangunan*, 111.

kehidupannya seperti perumahan dan pemukiman yang sehat

- b. Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya
- c. Peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai iptek yang berwawasan lingkungan
- d. Pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan perangkat hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas SDM.

### **3. Teori-Teori Ekonomi Sumber Daya Manusia**

Berikut teori-teori ekonomi sumber daya manusia yang muncul sejak zaman aliran klasik modern, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Teori klasik Adam Smith

Adam Smith menganggap bahwa manusia lah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia

---

<sup>21</sup>Imam Hardjanto, *Teori Pembangunan*, 112.

(SDM) yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan.

Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi

#### b. Teori klasik Jean Baptiste Say

Say berpandangan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Tiap ada produksi, akan ada pendapatan yang besarnya persis sama dengan nilai produksi tadi. Dengan demikian dalam keadaan keseimbangan, produksi cenderung menciptakan permintaannya sendiri akan produksi barang yang bersangkutan.

Dengan dasar asumsi seperti ini ia menganggap bahwa peningkatan produksi akan selalu diiringi oleh

peningkatan pendapatan, yang akhirnya akan diiringi pula oleh peningkatan permintaan.

#### c. Teori Malthus

Menurut Malthus, manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang menurut deret ukur (2,4,8,16,32, dst), sedangkan pertumbuhan produksi makanan meningkat hanya berdasarkan deret hitung (3, 4, 6, 8, 10, dst). Karena perkembangan jumlah manusia jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi makanan, maka diramalkan akan terjadi malapetaka yang akan menimpa manusia dikemudian hari.

#### d. Teori Keynes

Keynes banyak mengkritik teori-teori dari sistem klasik, diantara pendapatnya adalah bahwa tidak ada mekanisme penyesuaian otomatis yang menjamin bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan pada

tingkat penggunaan kerja penuh. Hal ini dalam analisisnya mengenai pasar tenaga kerja.

e. Teori Harrod Domar

Teori ini dikenal pula sebagai teori pertumbuhan. Menurut teori ini, investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi yang membutuhkan permintaan yang lebih besar agar produksi tidak menurun. Jika kapasitas yang lebih besar tidak diikuti dengan permintaan, maka surplus akan muncul dan disusul penurunan produksi.

Pembangunan manusia yang dimaksudkan dalam IPM tidak sama dengan pengembangan sumber daya manusia yang biasanya dimaksudkan dalam teori ekonomi. Sumber daya manusia menunjuk pada manusia sebagai salah satu faktor produksi, yaitu sebagai tenaga kerja yang produktivitasnya harus ditingkatkan. Dalam hal ini manusia hanya sebagai alat (*input*) untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan output barang dan jasa. Sedangkan manusia di dalam IPM lebih diartikan sebagai tujuan



pembangunan yang orientasi akhirnya pada peningkatan kesejahteraan.

#### 4. Pembangunan manusia dalam perspektif islam

Dalam islam. Faktor manusialah yang lebih berperan dalam sebuah pembangunan. Manusia yang berperilaku dengan akhlak islam, manusia yang bebas dari merdeka, manusia dengan tauhid yang bersih, semua hal ini dapat dicapai tentu saja melalui tarbiyah insaniyah itu sendiri, pendidikan yang menyeluruh dan bukan sebagian saja.

Sebagai khalifah Allah SWT, manusia memiliki kewajiban untuk memakmurkan bumi Allah sebagaimana firman Allah: Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka yang saleh. Saleh berkata:

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا  
 اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ۗ ثُمَّ تَوَبُّوا  
 إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّحِيبٌ

*Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-hamba-Nya). (Q.S Hud:61)*

Pembangunan manusia adalah pembangunan yang menyeluruh ‘at-tanmiyah asy-syumuliyah’. Termasuk dalam hal ini adalah pembangunan manusia itu sendiri. Pembangunan yang berdasarkan konsep rabbani. Konsep yang tidak hanya terpaku kepada pembangunan aspek keduniaan dan materi saja, tetapi juga aspek ruhiyah dan akhirat. Islam tidak pernah memisahkan keduanya. Konsep yang mengajak kepada keadilan dan keseimbangan antara kepentingan individu tanpa melakukan kepentingan bersama. Konsep yang menolak keras pembangunan yang hanya mengayakan sebagian golongan kecil dan memiskinkan golongan lainnya. Konsep yang menghadirkan rasa tanggung jawab. Keseimbangan dan keselarasan antara ruh dan jasad, antara ilmu dan akhlak akan melahirkan keberkahan yang dijanjikan Allah SWT dalam firmanNya:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا  
فَأَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

*Jikalau sekiranya penduduk neger-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya (Al-A'raf:96)*

## **B. Pengangguran**

### **1. Ketenagakerjaan**

Untuk keperluan analisis ketenagakerjaan secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua golongan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagai tenaga kerja ialah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda antara negara satu dengan negara lain. Batas kerja yang dianut Indonesia ialah minimum 10 tahun, tanpa batas umur maksimum. Batas usia kerja versi bank Dunia adalah antara 15 hingga 64 tahun.<sup>22</sup>

Tenaga kerja dipilah pula kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan; yakni orang-orang

---

<sup>22</sup>Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1997), 74.

yang kegiatannya bersekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga (ibu-ibu yang memang bukan wanita karir), serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (pensiunan, penderita cacat yang dependen).

Selanjutnya, angkatan kerja dibedakan pula menjadi dua subkelompok yaitu pekerja dan penganggur. Pekerja ialah mencakup orang yang mempunyai pekerjaan dan memang sedang bekerja serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu kebetulan tidak sedang bekerja. Biro pusat statistik mendefinisikan bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara kontinyu dalam seminggu yang lalu. Adapun yang dimaksud penganggur ialah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang bekerja dan (masih atau sedang) mencari pekerjaan. Penganggur semacam ini oleh BPS dinyatakan sebagai penganggur terbuka.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, 75.

Luasnya pengangguran ini mencerminkan baik buruknya perekonomian. Indeks yang dipakai adalah tingkat pengangguran yang merupakan persentase jumlah orang yang sedang mencari pekerjaan terhadap jumlah orang yang menawarkan tenaga kerjanya atau dirumuskan sebagai:<sup>24</sup>

$$IP = \frac{\text{Pencari kerja}}{\text{Angkatan kerja}} \times 100\%$$

Tingkat pengangguran dihitung dengan cara membagi jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja, kemudian dikalikan seratus persen. Jadi, angka pembagiannya bukan jumlah tenaga kerja atau penduduk usia kerja, apalagi jumlah penduduk total. Disamping konsep tingkat pengangguran, dalam konteks ketenagakerjaan dikenal pula konsep Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan hasil bagi jumlah angkatan kerja terhadap jumlah tenaga kerja, lalu dikalikan seratus persen.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Arfida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 134.

<sup>25</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, 76.

## 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran

Dari data-data ketenagakerjaan dapat diketahui dan dihitung berbagai konsep yang berkaitan dengan tingkat pengerjaan dan tingkat pengangguran. Konsep-konsep dimaksud adalah TPAK, tingkat pengerjaan dan tingkat pengangguran. Angka-angka semacam ini berguna untuk mengenali situasi yang berlangsung di pasar kerja. Pemahaman tentang situasi pasar kerja berguna bukan saja bagi perumusan kebijaksanaan ketenagakerjaan dan penciptaan kesempatan kerja. Akan tetapi juga perumusan kebijaksanaan kependudukan dan sumber daya manusia secara keseluruhan.<sup>26</sup>

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat pengerjaan} = \frac{\text{Jumlah pekerja}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat pengangguran} = \frac{\text{Jumlah penganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

---

<sup>26</sup>Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, 79.

### 3. Teori Ketengakerjaan<sup>27</sup>

Ada dua teori penting dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan, yaitu *pertama* teori Lewis yang mengatakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja dalam satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan *output* dan penyediaan pekerja di sektor lain.

Menurut Lewis, adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya kelebihan tenaga kerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa perpindahan pekerja dari sektor subsistem ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi terlalu banyak.

Teori *kedua* adalah Teori Fei-Ranis yang berkaitan dengan negara berkembang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak disektor pertanian,

---

<sup>27</sup>Imam Hardjanto, *Teori Pembangunan* , 115.

banyak pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Menurut Fei-Ranis ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh. *Pertama*, dimana para penganggur semua (yang tidak menambah *output* pertanian) dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. *Kedua*, tahap dimana pekerja pertanian menambah *output* tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan pula ke sektor industri. *Ketiga*, tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan *output* lebih besar daripada perolehan upah institusional. Dan dalam hal ini kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa dan industri yang meningkat terus menerus sejalan dengan penambahan *output* dan perluasan usahannya.

#### **4. Jenis-Jenis Pengangguran**

Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat dua cara untuk menggolongkannya yaitu: berdasarkan alasan mengapa mereka menganggur dan berdasarkan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour Utilization Approach*).



Kategori pengangguran berdasarkan alasan mengapa mereka menganggur mengelompokkan pengangguran kedalam beberapa kategori diantaranya, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Pengangguran Friksional, bukanlah wujud sebagai akibat dari ketidakmampuan memperoleh pekerjaan, melainkan sebagai akibat dari keinginan untuk mencari kerja yang lebih baik.
- b. Pengangguran Struktural, dikatakan pengangguran struktural karena sifatnya yang mendasar. Pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal ini terjadi dalam perekonomian yang berkembang pesat.
- c. Pengangguran Siklikal, adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pada waktu kegiatan ekonomi mengalami kemunduran,

---

<sup>28</sup>Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi-Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi*, 379.

perusahaan-perusahaan harus mengurangi kegiatan memproduksi.

- d. Pengangguran Musiman, pengangguran ini berkaitan erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian.

Pengangguran ditinjau dari pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour Utilization Approach*) didefinisikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Angkatan kerja ini dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Menganggur (*Unemployed*), yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini juga sering dijuluki sebagai pengangguran terbuka (*Open Unemployed*).
- b. Setengah Menganggur (*Underemployed*), yaitu mereka yang bekerja, tetapi belum dimanfaatkan

---

<sup>29</sup>Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi-Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi*, 378-382.

secara penuh. Artinya jam kerja mereka dalam seminggu kurang dari 35 jam.

- c. Bekerja Penuh (*Employed*), yaitu orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.

### **5. Pengangguran Dalam Perspektif Islam**

Dalam perspektif ekonomi islam menganggur merupakan bukan suatu anjuran yang diajarkan dalam islam. Islam menganjurkan bagi seluruh umatnya untuk bekerja keras dan senantiasa mencari rizki dari jalan yang telah Allah ridhoi seperti bekerja, bercocok tanam, berdagang dan menghidupkan tanah yang mati. Ada banyak sekali faktor-faktor yang mendorong individu manusia untuk menganggur atau menjadi pengangguran seperti upah atau imbal balik dari yang telah dikerjakan (bekerja). Ketidaksesuaian upah atau gaji akan menimbulkan rasa ketidakpuasan seseorang untuk tidak melakukan suatu kejahatan, islam sangat mengkhawatirkan hal itu terjadi karena akan menyebabkan orang-orang melakukan kegiatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl (16) ayat 97<sup>30</sup>

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ  
مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ  
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri alasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Sedangkan hadits nabi yang berkaitan dengan bekerja dapat dikemukakan antara lain:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله  
عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال : عمل  
الرجل بيده وكل بيع مبرور ، رواه البزار وصححه الحاكم

*Dari Rifa'ah bin Rafi', radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah ditanya: "Apakah pekerjaan yang paing baik?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seorang laki-laki denagn tangannya*

---

<sup>30</sup> Nurul Huda, Ranti Wiliasih, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), 227.

*sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jua beli yang mabrur. (HR. Bazzar dan dishahihkan oleh al Hakim.)*<sup>31</sup>

Dari ayat dan hadits di atas Allah SWT telah memberikan suatu anjuran atau penekanan kepada manusia melalui Al-Qur'an dan Rasulnya terhadap pekerjaan, amal, dan bekerja keras dan melarang manusia di bumi ini untuk berleha-leha menjadi pengangguran karena pada dasarnya bekerja bisa dilakukan dengan tangannya sendiri seperti usaha jual – beli dan lain sebagainya.

Menurut Al-Syaibani dalam pemikirannya tentang Al- Kasb (kerja) ia mendefinisikan al-kasb (kerja) sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam pandangan islam, aktivitas produksi merupakan bagian dari kewajiban *Imaratul kaun*, yakni menciptakan kemakmuran smesta untuk semua makhluk. Berkenaan dengan hal tersebut, Al-Syaibani menegaskan bahwa kerja yang merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam

---

<sup>31</sup> Nurul Huda, Ranti Wiliasih, *Ekonomi Makro Islam*, 228.

kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT dan karenanya, hukum bekerja adalah wajib.<sup>32</sup>

Al-Syaibani juga menyatakan bahwa sesuatu yang dapat menunjang terlaksananya yang wajib, sesuatu itu menjadi wajib pula hukumnya. Lebih jauh, ia menguraikan bahwa untuk menunaikan berbagai kewajiban, seseorang memerlukan kekuatan jasmani itu dan kekuatan jasmani itu sendiri merupakan hasil mengonsumsi makanan yang diperoleh melalui kerja keras. Dengan demikian, kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunaikan suatu kewajiban dan karenanya, hukum bekerja adalah wajib.<sup>33</sup>

Dari uraian tersebut, tampak jelas bahwa orientasi bekerja dalam pandangan Al-Syaibani adalah hidup untuk meraih keridhaan Allah SWT. Di sisi lain, kerja merupakan usaha untuk mengaktifkan roda perekonomian, termasuk proses produksi, konsumsi, dan distribusi, yang berimplikasi secara makro meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan

---

<sup>32</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 258.

<sup>33</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 259.

demikian, kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam memenuhi hak Allah SWT, hak hidup, hak keluarga, dan hak masyarakat<sup>34</sup>

### **C. Pertumbuhan Ekonomi**

#### **1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jika perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Defiinisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil perorang.<sup>35</sup>

Menurut Ahmad Mahyudi, pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya penambahan atau perubahan pendapatan nasional

---

<sup>34</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 260.

<sup>35</sup> Imam Hardjanto, *Teori Pembangunan* (Malang: UB Press), 73.

(Produksi nasional/GDP/GNP) dalam satu tahun tertentu, tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya.<sup>36</sup>

Dalam teori makro ekonomi yang dimaksud dengan pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu, dan secara konseptual nilai tersebut dinamakan produk domestik bruto (PDB). Nilai tersebut dapat dihitung menurut harga berlaku (yaitu pada harga-harga yang berlaku pada tahun dimana PDB dihitung dan menurut harga tetap, yaitu pada harga-harga yang berlaku pada tahun dasar).

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dalam dunia nyata, amat sulit untuk mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Kesulitan itu muncul bukan saja karena jenis barang dan jasa yang dihasilkan sangat beragam tetapi satuan ukurannya pun berbeda. Karena itu angka yang digunakan untuk menaksir perubahan output adalah nilai

---

<sup>36</sup> Ahmad Mahyudi, *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004),1.



materinya (uang) yang tercermin dalam nilai Produk Domestik bruto (PDB).

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan, sebab dengan menggunakan harga konstan, pengaruh perubahan harga telah dihilangkan, sehingga sekalipun angka yang muncul adalah nilai uang dari total output barang dan jasa, perubahan nilai PDB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode pengamatan. Mengingat sulitnya mengumpulkan data PDB, maka perhitungan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilakukan setiap saat, biasanya dilakukan dalam dimensi waktu triwulan dan tahunan.

## **2. Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi**

Secara sederhana pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan cara membandingkan perhitungan nasional pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Berikut rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi:

$$G_t = \frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{PDB_t} \times 100\%$$

Dimana:

$G^t$  = Pertumbuhan ekonomi periode t (triwulan atau taunan)

$PDBR^t$  = Produk domestik bruto riil periode t (berdasarkan harga konstan)

$PDBR_{t-1}$  = PDBR satu periode sebelumnya

Jika interval waktunya lebih dari satu periode, maka perhitungan pertumbuhan ekonominya menjadi sebagai berikut:

$$PDBR^t = PDBR_0 (1+r)^t$$

Dimana:

$PDBR^t$  = PDBR periode t

$PDBR_0$  = PDBR periode awal

t = Jarak periode

r = Tingkat pertumbuhan

### 3. Teori dan Model Pertumbuhan Ekonomi<sup>37</sup>

#### a. Teori inovasi Schumpeter

Pada teori ini menekankan pada faktor inovasi entrepreneur sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi kapitalistik. Dinamika persaingan akan mendorong hal ini.

---

<sup>37</sup> Imam Hardjanto, *Teori Pembangunan* (Malang: UB Press), 76.

b. Model pertumbuhan Harrot-Domar

Teori ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural. Selain kuantitas faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan juga kenaikan efisiensi karena pendidikan dan latihan. Model ini dapat menentukan berapa besarnya tabungan atau investasi yang diperlukan untuk memelihara tingkat laju pertumbuhan ekonomi natural yaitu angka laju pertumbuhan ekonomi natural dikalikan dengan nisbah kapital-ouput.

c. Model input-ouput Leontief

Model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antar industri. Dengan menggunakan ini maka perencanaan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara konsisten karena dapat diketahui hubungan aliran input-output antar industri. Hubungan tersebut diukur dengan koefisien input-output dan dalam jangka pendek/menengah dianggap konstan tidak berubah.

d. Model pertumbuhan Lewis

Model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus negara sedang berkembang banyak (padat) penduduknya.

Tekanannya adalah pada perpindahan kelebihan penduduk disektor pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang di biyai dari surplus keuntungan.

e. Model pertumbuhan ekonomi Rostow

Model ini menekankan tinjauannya pada sejarah tahap pertumbuhan ekonomi serta ciri dan syarat masing-masing. Tahap-tahap tersebut adalah tahap masyarakat tardisonal, tahap masyarakat lepas landas, tahap gerakan ke arah kedewasaan, dan akhirnya tahap konsumsi tinggi.

**4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekonomi Modern<sup>38</sup>**

- a. Akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik dan sumber daya manusia (*Human resources*).
- b. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) yang secara umum dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>38</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: alfabeta, 2016), 69.

- c. Kemajuan teknologi, merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi dapat dikelompokkan dalam tiga macam, yaitu: netral, hemat tenaga kerja (*labor saving*), dan hemat modal (*capital saving*).

## **5. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Islam**

Banyak ahli ekonomi maupun ahli fikih yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan bukan hanya aktivitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi, pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi materil dan spiritual manusia.

Istilah ekonomi pembangunan yang dimaksudkan dalam islam adalah proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan. Dalam penegrtian ini, maka pembangunan ekonomi menurut islam bersifat multidimensi yang tujuannya bukan

semata-mata kesejahteraan material didunia, tetapi juga kesejahteraan di akhirat. Keduanya secara islam menyatu secara integral.

Pusat dari ekonomi pembangunan menurut islam adalah manusia. Manusia sebagai kapital dengan akal yang dimilikinya dan juga sebagai khalifah diharapkan mampu untuk mengelola alam ini untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat.<sup>39</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ

*Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. (Q.S Ar-Ra'd ayat 29)*

Para ulama merumuskan bebrapa falsafah pembangunan yang sesuai untuk pembangunan ekonomi menurut islam, yaitu:<sup>40</sup>

1. Tauhid, konsep yang menekankan kepada aspek hukum yaitu Allah sebagai pemilik dan penguasa yang mutlak keatas segala isi bumi dan langit. Begitu

---

<sup>39</sup>Agung Eko Purwana, Pembangunan dalam perspektif Ekonomi Islam, Justitia Islamica, Vol. 10 No 1, 2013, h.18.

<sup>40</sup>Nor Sahida Mohamaddan, Pembangunan menurut perspektif ekonomi islam: Satu Analisis Awal, Prosiding Perkem VIII, jilid 1, 2013, h.366-368

juga halnya dengan pembangunan. Konsep pembangunan yang diterapkan oleh islam ialah konsep yang meletakkan Allah sebagai pemilik mutlak keatas sumber yang terdapat dialam semesta ini.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا  
بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ  
كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

*Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka (Q.S sad ayat 27)*

2. Khalifah, Khalifah merujuk kepada fungsi manusia sebagai pengurus alam semesta supaya mencapai kesejahteraan dan barakah. Tanggung jawab khalifah dalam memakmurkan bumi Allah adalah meliputi tanggungjawab untuk menjaga kemaslahatan manusia, alam sekitar, dan kehidupan yang lain. Dalam konsep pembangunan, para ilmuwan islam telah meletakkan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab dan berperan dalam menentukan tingkat pembangunan.

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُم  
 مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا  
 لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

- Sebagai khalifah Allah, manusia bertanggungjawab kepada-Nya dan mereka akan diberi pahala atau siksa di hari kelak berdasarkan apakah kehidupan mereka didunia ini sesuai atau bertentangan dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah SWT. Khalifah pada dasarnya mengandung makna persatuan fundamnetal dan persaudaraan umat mausia
3. Keadilan, yaitu pembangunan ekonomi yang merata atau dapat dinikmati secara keseluruhan oleh semua masyarakat. Konsep persaudaraan umat islam akan berjalan seiring dengan konsep peradilan. Oleh karena itu, menjadi tanggungjawab manusia dalam meningkatkan pembangunan negara yang bergerak sama dengan konsep keadilan bersama.



## **D. Pengeluaran Pemerintah**

### **1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa  $Y=C+I+G+X-M$ . Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional (dalam arti luas), sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinnya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan agregat atau pendapatan nasional. Dengan itu pula dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional.<sup>41</sup>

Pengeluaran pemerintah provinsi pada sektor pendidikan pada umumnya mengalami kenaikan, namun besarnya masih dibawah pengeluaran pemerintah pada sektor industri, perumahan

---

<sup>41</sup>Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, 157.

dan pemukiman, serta sektor ekonomi lainnya. Jelas ini mendeskripsikan bahwa pemerintah Indonesia masih kurang perhatian terhadap sektor pendidikan. Ranah pembangunan manusia melalui sektor pendidikan turut dipertimbangkan, karena melalui pendidikan manusia mengalami sebuah proses. Proses tersebut dilalui oleh manusia untuk meningkatkan ilmu, pengetahuan, kemampuan/keahlian, meningkatkan kreativitas ataupun inovasi yang keseluruhannya dapat meningkatkan harkat dan martabat setiap individu. Pendidikan terlihat sebagai investasi sumber daya saat ini untuk mendapatkan *return* dimasa depan. Apabila kualitas sumber daya manusia tersebut rendah yang tercermin adalah tingkat pendidikan yang rendah pula yang tentunya berpengaruh juga pada pembangunan manusia.

Pemerintah tentu saja tidak hanya melakukan pengeluaran, akan tetapi juga boleh penerimaan. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah diliput dalam suatu konsep terpadu mengenai pendapatan dan belanja negara. Kebjaksanaan-kebijaksanaan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran

pemerintah (pendapatan dan belanja negara) disebut kebijakan fiskal.

Pola pembiayaan dan mekanisme penerimaan dan pengeluaran untuk pembiayaan kegiatan pemerintah dalam mengelola negara tidaklah sama dengan mekanisme penerimaan dan pengeluaran untuk pembiayaan rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Jumlah anggaran pengeluaran negara tidak ditentukan oleh besarnya penerimaan, tetapi justru jumlah pengeluaran negaralah yang akan memengaruhi jumlah anggaran penerimaan negara itu. Hal ini terjadi karena negara harus dapat menjamin kebutuhan minimum masyarakatnya.<sup>42</sup>

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia. Faktor tersebut, merupakan layanan jasa yang normatifnya disediakan oleh pemerintah, bukan bertumpu pada swasta terlebih pasar. Dalam hal peningkatan pembangunan manusia, pendidikan yang baik bagi setiap manusia bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan. Dengan

---

<sup>42</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 12.

meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah disektor tersebut maka akan meningkatkan prioduktivitas penduduk sehingga bisa meningkatkan pembangunan manusia. Untuk selanjutnya, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dapat disebut sebagai investasi publik.

## 2. Teori Pengeluaran Pemerintah<sup>43</sup>

Identitas keseimbangan pendapatan nasional  $Y = C + I + G + X - M$  merupakan sumber legitimasi pandangan kaum keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Kenaikan (penurunan) pengeluaran pemerintah akan menaikkan (menurunkan) pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan

---

<sup>43</sup>Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, 161.

kerja adalah tidak memadai, melainkan harus pula diperhitungkan siapa (masyarakat lapisan mana) yang akan terperkerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan pihak swasta.

Pengamatan empiris oleh Adolpb Wagner terhadap negara-negara eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Ekonom Jerman ini mengukurnya dari perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional.

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Kelima penyebab dimaksud adalah tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi pemerintah. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai

pemerintah (*organis theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

WW Rostow dan RA Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Dalam suatu proses pembangunan, menurut Musgrave, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Rostow dan Musgrave seperti halnya Wagner, menandai pendapatannya berdasarkan pengamatan pembangunan ekonom di banyak negara.

Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis dialitika penerimaan-pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan

dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang kian besar.

Menurut Peacock dan Wiseman, perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat, yang meskipun tarif pajaknya mungkin tidak berubah, pada gilirannya mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat pula. Jadi, dalam keadaan normal kenaikan pendapatan nasional menaikkan pula baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah.

### **3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan**

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pemerintah pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata.

Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan<sup>44</sup>

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan untuk mencapai pembangunan.

#### **4. Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perekonomian<sup>45</sup>**

##### **a. Produksi**

Pengeluaran pemerintah dapat dikatakan juga sebagai faktor produksi lainnya disamping faktor-faktor

---

<sup>44</sup>Merang Kahang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto, Jurnal ekonomi, *Pengaruh Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten Kutai Timur, Vol.18, NO.2,2016*

<sup>45</sup>Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 211.



produksi lainnya yang berupa alam, modal, tenaga kerja, dana manajemen, karena pemerintah dapat menunjang tersedianya faktor-faktor produksi tersebut. Misalnya, pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terdidik. Sumber daya manusia itu memperbesar faktor produksi yang berupa tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan oleh sektor produksi.

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

#### b. Distribusi

Pengeluaran negara, secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa. Ambil contoh hasil dari pengeluaran anggaran untuk membiayai fasilitas kesehatan, paling tidak akan mencegah

penyakit yang terjadi di masyarakat sehingga akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

c. Konsumsi

Secara langsung atau tidak langsung pengeluaran negara dapat mengubah atau memperbaiki pola dan tingkat konsumen masyarakat terhadap barang-barang dan jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah maupun mekanisme pasar.

d. Keseimbangan perekonomian

Dengan kebijakan fiskalnya pemerintah dapat memperbaiki dan memelihara keseimbangan perekonomian dan meningkatkan pendapatan nasionalnya melalui target peningkatan PDB. Kebijakan fiskal itu dapat berupa pelaksanaan kebijaksanaan surplus anggaran, defisit anggaran, kompensasi, investasi umum tergantung kepada situasi ekonomi yang dihadapi atau iklim ekonomi yang diinginkan.

## **5. Pengeluaran Pemerintah Dalam Persepektif Islam**

Pemerintah dalam pandangan islam merupakan pihak yang wajib mengatur dan mengalokasikan dana yang didapatkan dari sumber daya alam dan pajak pada negaranya. Kebijakan Pemerintah di Indonesia mengalokasikan pendapatanya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau biasa disingkat dengan APBN. Alokasi itu dikelola dan di atur secara terencana oleh pemerintah sehingga dana yang ada akan berpengaruh pada kemakmuran seluruh rakyatnya.

Jika pada masa Rasulullah salallahu'alaihi wassalam, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan negara adalah mendistribusikan semua pendapatan yang diterima. Namun hal ini akan berbeda dengan masa khalifah pada umumnya.

Dalam sejarah banyak sekali riwayat menyebutkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh khulafaa ar-rashidin selalu mengedepankan kemakmuran dan distribusi yang merata kepada seluruh rakyatnya. Salah

satunya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal secara umum adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan fiskal dapat juga diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian yang ada pada sebuah negara. Dalam Islam kebijakan fiskal bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang dan merata. Sebagaimana yang kita tahu bahwa fungsi sebuah negara adalah untuk mengatur dan menjembatani interaksi-interaksi manusia yang ada di dalamnya. Oleh sebab itulah kebijakan pemerintah dalam hal kebijakan fiskal akan sangat mempengaruhi kesejahteraan dalam sebuah negara.

Efisiensi dan efektivitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Sebagai suatu panduan pokok bagi pengeluaran publik, teori pengeluaran islam memakai kaidah-kaidah yang diambil dari *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* guna menghindari potensi-potensi inefisiensi pengeluaran, dan juga norma-norma konsumsi islam, serta dijadikan kaidah rasionalitas bagi pengeluaran negara. Menurut Asy-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Umer Chapra Enam kaidah tersebut adalah:<sup>46</sup>

1. Kriteria pokok bagi semua alokasi pengeluaran harus digunakan untuk kemaslahatan rakyat.
2. Penghapusan kesulitan dan kerugian didahulukan daripada penyediaan kenyamanan.

---

<sup>46</sup>Umer Chapra, Alih Bhasa: Ikhwan Abidin Basri, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam, (Jakarta: Gema Insani Pers dan Tazkia Institute, 2000), h.285

3. Kemaslahatan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan dari pada kemaslahatan minoritas yang lebih sedikit.
4. Suatu pengorbanan atau kerugian privat dapat ditimpakan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik, dan suatu pengorbanan atau kerugian yang lebih besar dapat dihindarkan dengan memaksakan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil.
5. Siapapun yang menerima manfaat harus bersedia menanggung biaya
6. Sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.

Kegiatan yang menambah pengeluaran negara mempunyai dampak tertentu pada kehidupan sosio ekonomi masyarakat. Berbeda dengan kitab-kitab agama lain, kitab suci al-quran telah menetapkan perintah-perintah yang sangat tepat mengenai kebijakan negara

tentang pengeluaran pendapatan negara. Al-quran telah menetapkan suatu kebijakan pengeluaran yang luas untuk distribusi kekayaan berimbang diantara berbagai lapisan masyarakat. Dalam al-quran dikatakan:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat ayat Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S Al-Baqarah:219)*

ini bukan berarti mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak menentu. Islam bukan hanya mencegah tapi mengutuk pemborosan. Penimbunan juga dikutuk karena dengan demikian kekayaan tidak dapat beredar dan manfaat penggunaannya tidak dapat dinikmati si pemakai ataupun masyarakat. Sesungguhnya, seluruh filsafat ekonomi tentang kegiatan tambahan pengeluaran negara adalah membawa surplus kekayaan kedalam peredaran dan untuk menjamin distribusi kekayaan berimbang dikalangan semua masyarakat. Hal ini

terutama dikalangan fakir miskin sesuai dengan hak-hak alami serta hak hak milik benda pribadi.

Pengeluaran pemerintah dalam hal ini yaitu melalui pendidikan. Ilmu pengetahuan dan islam dipandang sebagai suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan merupakan suluh penerang kehidupan sekaligus nafas peradaban. Kemajuan peradaban islam pada masa Abbasiyah di Irak hingga Andalusia di Spanyol (abad 7M-13M), berkat kemajuan ilmu pengetahuan pada masa itu begitu banyak ayat al-quran yang membicarakan akan keutamaan ilmu. Firman Allah:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ  
الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي  
الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ  
أُولُو الْأَلْبَابِ

*(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah diwaktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, seang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah: “ Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerma pelajaran. (Q.S Az-Zumar: 9)*



## **E. Kemiskinan**

### **1. Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan fenomena yang nyaris terdapat pada semua golongan negara.<sup>47</sup> Kemiskinan tidak saja tumbuh dan berkembang dalam sistem negara miskin tetapi juga menjadi ancaman bagi negara maju. Ancaman tersebut disebabkan karena kemiskinan bukanlah faktor otonom yang muncul dengan sendirinya dalam sebuah negara, tetapi sering kali juga karena dampak atau pengaruh dari factor lainnya.

Kemiskinan merupakan kondisi masyarakat yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Oleh karena itu kemiskinan dapat disebabkan karena sifat alamiah yaitu masalah yang muncul di masyarakat bertalian dengan pemilikan faktor produksi, produktivitas dan tingkat perkembangan masyarakat itu sendiri. Di samping itu

---

<sup>47</sup>Nurhayati Ali Assegaf, *Konsep Kesejahteraan dan problematika kemiskinan*(Malang: Intrans publishing, 2015), 33.

kemiskinan dapat disebabkan oleh masalah struktural, yaitu disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan.<sup>48</sup>

Mayoritas penduduk miskin di dunia adalah perempuan. Banyaknya rumah tangga yang dikepalai perempuan, kapasitas pendapatan perempuan yang lebih rendah, dan terbatasnya kendali mereka terhadap penghasilan pasangan semuanya berkontribusi terhadap gejala yang meresahkan ini. Selain itu, kaum perempuan memiliki akses yang lebih sedikit ke pendidikan, lapangan kerja sektor formal, jaminan sosial dan program penciptaan lapangan kerja. Kombinasi semua fakta ini menyebabkan sumber keuangan kaum perempuan lebih kecil dan tidak stabil dibandingkan dengan sumber keuangan laki-laki.<sup>49</sup>

## **2. Ukuran kemiskinan**

Secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

---

<sup>48</sup>Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, 78.

<sup>49</sup> Michael P Todaro dan Stephen C Smith alih bahasa oleh Agus Dharma, *Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2011), 292.

- a. Kemiskinan absolut, dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin, atau sering disebut dengan garis kemiskinan.
  - b. Kemiskinan relatif, adalah orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya. Hal ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya daripada lingkungan orang yang bersangkutan.
3. **Strategi/kebijakan Dalam Mengurangi Kemiskinan**<sup>50</sup>
- a. Pembangunan pertanian

Sampai saat ini sektor pertanian masih berperan sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan

---

<sup>50</sup>Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, 81.

pengurangan kemiskinan di Indonesia. Ada tiga aspek dari pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pengurangan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Ketiga aspek tersebut antara lain adanya revolusi teknologi pertanian, pembangunan irigasi, serta pembangunan pertanian diluar Jawa dengan pola transportasi.

b. Pembangunan sumber daya manusia

Pembangunan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, gizi) merupakan strategi pemerintah yang cukup penting untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia. Untuk meningkatkan investasi tersebut dibutuhkan investasi modal insani yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas golongan masyarakat miskin tersebut.

### c. Peran lembaga swadaya masyarakat (LSM)

LSM merupakan kelompok NGO yang memiliki peran yang besar dalam perancangan dan implementasi program pengurangan kemiskinan karena biasanya mereka sangat fleksibel dan memiliki pengetahuan tentang komunitas yang mereka bina. Dalam beberapa hal biasanya LSM ini dapat menjangkau golongan miskin lebih efektif ketimbang program-program pemerintah. Keterlibatan LSM dalam program-program pemerintah cenderung meningkatkan masyarakat terhadap program pemerintah, dengan demikian partisipasi masyarakat akan meningkat. Keterlibatan LSM juga dapat meringankan biaya finansial dan staff dalam mengimplementasikan program-program padat karya untuk mengurangi kemiskinan.

## **4. Pandangan Islam tentang kemiskinan**

Islam memandang baik fakir maupun miskin harus sama-sama dibantu, terlepas dari apapun definisinya secara bahasa. Fakir dalam perspektif Islam adalah suatu keadaan yang

serba kekurangan dan tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Misalkan seseorang yang sudah tua dan tidak memiliki tenaga untuk bekerja, maka ia dapat disebut fakir. Sedangkan miskin adalah keadaan dimana seseorang sudah bekerja, tetapi masih belum mencukupi kebutuhan hidupnya, Misalkan tukang sapu jalan tinggal di kota besar seperti Jakarta dan hanya mendapatkan honor di bawah Rp. 500.000; per bulan, sementara anaknya lebih dari tiga, maka honor tersebut tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhannya<sup>51</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang posisi atau derajat kemiskinan apabila dibandingkan dengan kekayaan, paling tidak ada dua kelompok. *Kelompok pertama*, berpendapat bahwa kemiskinan dan kefakiran lebih baik daripada kekayaan. Diantara argumen yang diajukan adalah beberapa ayat al-Qur'an yang memuji orang-orang yang fakir, diantaranya adalah firman Allah:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْثَافًا ۗ وَمَا تُدْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

---

<sup>51</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Ekonomi Makro ekonomi Islam - Teori, Konsep dan Analisis-*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 233

*(Apa yang kamu infakan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi, (orang lain) tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakan, sungguh, Allah Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah:273)<sup>52</sup>*

Demikian juga ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk tidak mengusir orang-orang miskin yang taat kepada Allah sebagai mana yang disyaratkan dalam firman-Nya:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ  
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا  
مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ  
الظَّالِمِينَ

*Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, mereka mengharapkan keridaan-Nya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau (berpihak) mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim (QS. Al-An'am: 52)<sup>53</sup>*

Disamping argumen normatif di atas, banyak praktik beragama yang dilakukan oleh para ulama, khususnya dari

---

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia), 822.

<sup>53</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 179.

kalangan sufi pada masa awal dan masa pertengahan, yang memilih untuk menjadi miskin. Ungkapan yang populer di kalangan ini diantaranya adalah, “Tuhan memuliakan kemiskinan dan menjadikannya derajat khusus orang-orang miskin yang telah melepaskan semua hal yang lahir dan batin dan benar-benar menghadap hanya kepada Allah”

*Kelompok kedua*, menganggap bahwa kekayaan jelas lebih utama daripada kemiskinan. Diantara argumen yang disampaikan adalah bahwa kekayaan itu adalah salah satu sifat Tuhan, Sedangkan kemiskinan tidak dapat dinisbatkan kepada-Nya. Disamping itu, begitu banyak ayat yang memuji orang yang menginfakan hartanya di jalan Allah. Bagaimana seseorang berinfak kalam miskin?

Dari pemaparan di atas mungkin ada sementara orang yang menduga terjadi kontradiksi dalam al-Qur’an; ada ayat yang memuji kemiskinan, ada juga ayat yang memuji kekayaan. Para ulama tafsir sepakat bahwa tidak ada kontradiksi dalam al-Qur’an. Kalau ada kesan tersebut, itu disebabkan oleh kekurangan manusia dalam memahami ayat-ayat alQur’an. Salah satu yang pasti, Allah menegaskan harta dunia itu dijadikan sebagai ujian bagi manusia.



Hal ini disebutkan dua kali dalam al-Qur'an, yaitu dalam firman-Nya:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ  
عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar (QS. Al-Anfal:28).<sup>54</sup>*

Ayat-ayat tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa al-Qur'an mendorong agar menjauhi dunia, sama sekali tidak. Karena ditemukan sekian banyak ayat yang mendorong agar manusia memaksimalkan usahanya untuk mencari karunia Allah SWT. Salah satu karunia Allah dalam hidup di dunia ini adalah harta<sup>55</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan kegiatan mendata dan mengevaluasi seluruh hasil studi atau penelitian terutama pada skripsi yang lebih dulu membahas fokus yang sama dalam ringkasan tersebut, harus digali kelebihan dan kekurangan skripsi yang telah ada. Berikut adalah skripsi yang terdahulu :

---

<sup>54</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 243.

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, (Jakarta: Departemen Agama, 2008), 47-50.

Tabel 2.1

## Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, dan Tahun	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Nur Baeti, <i>pengaruh gangguan, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia kabupaten/kota di provinsi jawa tengah tahun 2007-2011, 2013.</i>	<p><u>Persamaan:</u> variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini sama dengan variabel bebas dan variabel terikat yang akan penulis teliti yaitu: gangguan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia.</p> <p>Persamaan lainnya adalah di dalam penelitian ini juga analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.</p> <p><u>Perbedaan:</u> perbedaannya adalah waktu dan</p>	Kesimpulan dari penelitian ini adalah: gangguan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah berpengaruh secara serempak terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. Artinya, semakin rendah tingkat gangguan, semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan semakin meningkatnya pengeluaran

		<p>lokasi penelitian yang berbeda di Jawa Tengah dan di Provinsi Banten menurut kab/kota. Perbedaan lainnya adalah adanya penambahan variabel independen dalam penelitian ini yaitu kemiskinan.</p>	<p>pemerintah, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat. Pengangguran secara parsial berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Jawa tengah tahun 2007-2011. Artinya, semakin rendahnya tingkat pengangguran, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa tengah tahun 2007-2011. Artinya, semakin tinggi</p>
--	--	---	--

			<p>tingkat pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia akan mengalami peningkatan. Pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa tengah tahun 2007-2011. Artinya, semakin tinggi pengeluaran pemerintah, indeks pembangunan manusia akan mengalami peningkatan. Begitu pula sebaliknya apabila pengeluaran pemerintah turun sebesar satu satuan, maka indeks</p>
--	--	--	--

			pembangunan manusia akan turun sebesar satu satuan. <sup>56</sup>
2.	Deni Sulistio Mirza, <i>pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan Belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009, 2012.</i>	<p><u>Persamaan:</u> variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini sama dengan variabel bebas dan variabel terikat yang akan penulis teliti yaitu: kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia.</p> <p>Persamaan lainnya adalah di dalam penelitian ini juga analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.</p> <p><u>Perbedaan:</u> perbedaannya adalah waktu dan</p>	<p>Secara simultan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009.</p> <p>Kemiskinan secara parsial berpengaruh negative terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah pada tahun 2006-2009.</p> <p>Pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa</p>

<sup>56</sup>Nur Baeti, Jurnal ekonomi, *Pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah 2007-2011, Vol.2, NO.3, 2013*

		lokasi penelitian yang berbeda di Jawa Tengah dan di Provinsi Banten menurut kabupaten/kota.	Tengah pada tahun 2006-2009. Serta Belanja Modal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. <sup>57</sup>
3.	Novita Dewi, <i>pengaruh kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau</i>	<p><u>Persamaan:</u> variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini sama dengan variabel bebas dan variabel terikat yang akan penulis teliti yaitu: pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan indeks pembangunan manusia.</p> <p>Persamaan lainnya adalah di dalam penelitian ini juga analisis yang digunakan adalah</p>	Kesimpulan dari penelitian ini adalah: kemiskinan dan, pertumbuhan ekonomi, berpengaruh signifikan secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau Kemiskinan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan

---

<sup>57</sup> Denni Slistio Mirza, Jurnal Ekonomi, *Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia Di Jawa Tengah*, Vol.1, No.1, 2012.

		<p>analisis regresi berganda.</p> <p><u>Perbedaan:</u> perbedaannya adalah waktu dan lokasi penelitian yang berbeda di Provinsi Riau dan di Provinsi Banten menurut kab/kota. Perbedaan lainnya adalah adanya penambahan variable independent dalam penelitian ini yaitu pengangguran, dan pengeluaran pemerintah.</p>	<p>manusia (IPM) di Provinsi Riau Artinya, semakin rendahnya tingkat pengangguran, maka indeks pembangunan manusiapun akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia provinsi Riau hal ini dilihat dari <math>t_{hitung} &lt; t_{tabel}</math>, yaitu <math>0,437 &lt; 2,201</math> dan nilai signifikansi pertumbuhan ekonomi lebih besar dari 0,05 maka <math>H_0</math> diterima dan <math>H_a</math> ditolak.<sup>58</sup></p>
--	--	--	--

---

<sup>58</sup> Novita Dewi, Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap indeks pemabngunan manusia di Provinsi Riau, Vol.4, NO.1,2017

## G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik.<sup>59</sup>

Pengujian hipotesis akan membawa kepada kesimpulan untuk menolak atau menerima hipotesis. Agar pemilihannya lebih terperinci dan mudah, maka diperlukan hipotesis alternatif yang selanjutnya disingkat  $H_1$  dan hipotesis nol yang selanjutnya disingkat  $H_0$ .  $H_1$  cenderung dinyatakan dalam kalimat positif. Sedangkan  $H_0$  dinyatakan dalam kalimat negatif.

Adapun hipotesis penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah:

$H_1$ : Pengangguran *berpengaruh* terhadap Indeks pembangunan manusia

$H_2$ : Pertumbuhan Ekonomi *berpengaruh* terhadap Indeks pembangunan manusia

---

<sup>59</sup>Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Jakarta: Erlangga, 2013), 59.



H<sub>3</sub>: Pengeluaran Pemerintah *berpengaruh* terhadap Indeks pembangunan manusia

H<sub>4</sub>: Kemiskinan *berpengaruh* terhadap Indeks pembangunan manusia